



IMPLEMENTASI KONSEPSI SUMPAH PEMUDA DALAM KONSTELASI BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTION OF SUMPAH PEMUDA IN THE CONSTELLATION OF THE INDONESIAN NATION AND STATE

Iis Suryani¹, Edy Sofyan²

¹Universitas Persatuan Islam

²STKIP Pasundan

Email: iisuryani1412@gmail.com, kangedysofyan@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, NKRI.

ABSTRAK

Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak peristiwa sebelum terbentuknya Indonesia sebagai suatu negara bangsa tanggal 18 Agustus 1945. Artikel ini membahas tentang eksistensi Sumpah Pemuda dalam ketatanegaraan Indonesia, dan implementasi konsepsi Sumpah Pemuda dalam konstelasi berbangsa dan bernegara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai “pisau” analisis dalam karya ilmiah ini adalah metode historis, yang mendeskripsikan secara tuntas semua permasalahan berdasar data dan fakta yang diinterpretasikan peneliti. Adapun langkah penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi serta historiografi. Implementasi dari Sumpah Pemuda dalam aspek Bahasa Indonesia, sebenarnya merupakan hal yang paling awal dibanding dengan dua aspek lainnya (tanah air maupun bangsa) disamping hal yang paling mudah diimplementasikan dalam tata kehidupan secara perorangan orang Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung (rakyat Indonesia waktu itu) maupun oleh organisasi-organisasi yang ada masa Pergerakan Nasional. Peringatan Sumpah Pemuda dalam panggung sejarah NKRI sampai tahun 2022, setiap tanggal 28 Oktober merupakan salah satu bukti dari makna pentingnya arti berbangsa, bertanah air dan berbahasa nasional yang bisa merupakan faktor integrative dan kelanggengan Indonesia sebagai negara bangsa. Namun bukan berarti NKRI akan selalu mempunyai tingkat Ketahanan Nasional yang stabil hanya dengan selalu memperingati setiap tahunnya, perlu adanya kebijakan dari pemerintah diperkuat melalui legislasi kewilayahan/tanah air, penguatan nilai-nilai berbangsa dan bernegara serta pembinaan Bahasa Indonesia yang terus menerus (baik dalam aspek formal maupun aspek non formal di masyarakat).

Copyright © 2022 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Youth Congress,
Sumpah Pemuda,
NKRI.

ABSTRACT

The second Youth Congress in 1928 which declared the Sumpah Pemuda was one of the milestones before the formation of Indonesia as a nation state on August 18, 1945. This article discusses the existence of the Sumpah Pemuda in the Indonesian constitution, and the implementation of the Sumpah Pemuda conception in the constellation of the Indonesian nation and state. The research method used by the researcher as the "knife" of analysis in this scientific work is the historical method, which thoroughly describes all problems based on data and facts interpreted by the researcher. The research steps in this study were carried out in 4 stages, namely: heuristics, criticism, interpretation and historiography. Implementation of the Sumpah Pemuda in the aspect of Indonesian, is actually the earliest thing compared to the other two aspects (homeland and nation) in addition to the things that the easiest way to implement it in the way of life for individual Indonesians, either directly or indirectly (the Indonesian people at that time) or by organizations that existed during the National Movement period. Commemoration of the Sumpah Pemuda on the stage of the history of the Unitary State of the Republic of Indonesia until 2022, every 28 October is one of the proofs of the importance of the meaning of nation, homeland and national language which can be an integrative factor and the longevity of Indonesia as a nation state. But that does not mean that the Unitary State of the Republic of Indonesia will always have a stable level of National Resilience just by always commemorating it every year, it is necessary to have policies from the government strengthened through regional/homeland legislation, strengthening the values of the nation and state and continuous development of the Indonesian language (both in aspects formal and non-formal aspects in society).

Copyright © 2022 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak peristiwa sebelum terbentuknya Indonesia sebagai suatu negara bangsa tanggal 18 Agustus 1945, setelah sehari sebelumnya diproklamasikan oleh Sukarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa di Pegangsaan Timur 58 Jakarta.

Sumpah Pemuda merupakan satu keputusan akhir hasil dari Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928, yang mempunyai "nilai monumental" dalam menentukan perjalanan kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya (bahkan sampai sekarang ini, dimana tanggal 28 Oktober 2018 diperingati hari Sumpah Pemuda ke-90 dalam upacara kenegaraan Indonesia).

Sebenarnya dalam perjalanan sejarah Indonesia (pra maupun pasca kemerdekaan) tidak sedikit diselenggarakan kongres pemuda sejenis yang dilakukan, namun nuansa kekentalan dengan rasa-faham dan jiwa kebangsaan Indonesia tidaklah "sesakral" Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan konsepsi Sumpah Pemuda itu sendiri.

Keberanian kaum muda dari berbagai organisasi yang mengkonsolidasikan diri pasca Kongres Pemuda I tahun 1928 mendobrak tradisi yang selama itu dianggap oleh pemerintah Belanda yang menguasai Hindia Belanda (atau Nusantara, sebelum penamaan kata Indonesia dilekatkan) di luar kalkulasi politiknya, sehingga pengawasan sangat lekat dari polisi Belanda yang terus menerus dikala dilaksanakan Kongres Pemuda II.

Sugondo Djojopuspito yang sudah sangat "*prepare*" mengantisipasi untuk mengingatkan terjadinya "gesekan" polisi pemerintah Belanda dengan para peserta kongres, pada akhirnya tidak bisa membendung semangat para peserta kongres untuk serta merta mengikrarkan sumpah sebagai hasil keputusan kongres kedua tersebut.

Dalam catatan sejarah kenegaraan Indonesia selanjutnya, khususnya menyangkut pembabakan dari nasionalisme Indonesia, dilekatkan kata "penegas" untuk keberanian para peserta kongres kedua ini setelah melalui perjalanan sejarah dari tahap masa "kebangkitan nasional" tahun 1908.

Tidaklah diperingati hanya sebatas seremonial, bila sebenarnya peristiwa Kongres Pemuda II yang melahirkan konsepsi Sumpah Pemuda ini tidak mempunyai arti penting dalam kelangsungan hidup Bangsa Indonesia sampai saat ini pasca 90 tahun peristiwa tersebut berlangsung.

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia pra-kemerdekaan, sejak memasuki abad ke-20, banyak peristiwa penting yang merupakan momen bersejarah setelah peristiwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang selalu diperingati, namun menurut peneliti "kharismanya" tidak sehidmat peristiwa Kongres Pemuda II yang melahirkan Ikrar Pemuda yang kemudian hari diganti menjadi SUMPAH PEMUDA.

Artikel ini akan membahas tentang eksistensi Sumpah Pemuda dalam ketatanegaraan Indonesia dan implementasi konsepsi Sumpah Pemuda dalam konstelasi berbangsa dan bernegara sebagai suatu negara bangsa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai "pisau" analisis dalam karya ilmiah ini adalah metode historis, yang mendeskripsikan secara tuntas semua permasalahan berdasar data dan fakta yang diinterpretasikan peneliti. Adapun langkah penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi serta historiografi.

Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, serta kunjungan ke Musium Sumpah Pemuda jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, sebagai pembanding "*zeitgeist*" untuk visualisasi peneliti sendiri. Kritik ekstern maupun kritik intern dilakukan peneliti, guna memfilter sumber yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sebelum dilakukan interpretasi yang mempunyai pengaruh "besar" dari kesubjektifan seorang peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kongres Pemuda II sebagai Momentum lahirnya Sumpah Pemuda

Kongres Pemuda II tahun 1928 yang berakhir dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda I tahun 1926 yang diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di Musium Sumpah Pemuda sekarang yang beralamat di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat.

Kongres Pemuda I sendiri diselenggarakan oleh sebuah panitia, yang didahului dengan rapat panitia tanggal 15 November 1925, dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi pemuda kedaerahan, diantaranya: Jong Jawa (Sunarto, Suwarso dan Tabrani), Jong Sumatranen Bond (Jamaludin Adinegoro, Bahder Johan serta Sarbaini), Sekar Rukun (Hamami), Pelajar-pelajar Minahasa (Paul Pinontoan), Jong Ambon (Jan Toule Soulehuway), serta Jong Bataks (Sanusi Pane).

Kongres Pemuda I baru dilaksanakan mulai tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926. Keputusan dalam kongres ini menyepakati adanya masalah bahasa persatuan dengan dua pilihan, yaitu antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Namun kemudian pilihan jatuh pada bahasa Melayu dengan asumsi dasar pertimbangan struktur bahasanya yang lebih sederhana dibanding bahasa Jawa.

Selain Muhamad Yamin, turut juga berbicara Sunarto yang menyajikan tentang "Indonesia bersatu", maksudnya Hindia Belanda bersatu. Keputusan penting dari Kongres pertama ini, menyepakati adanya konsep "satu nusa dan satu bangsa, dengan nama Indonesia, sementara untuk penggunaan bahasa tidak tercapai kesepakatan, mengingat bahasa Melayu tidak identik dengan bahasa Indonesia (Hindia Belanda, dari perspektif kekuasaan pemerintah Belanda).

Dua tahun setelah masa jeda dari Kongres Pemuda 1, diselenggarakan Kongres Pemuda II, yang diikuti oleh organisasi-organisasi pemuda yang lebih banyak dan beragam, diantaranya: Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond (dipimpin oleh Amir Syarifudin), Wakil Pemuda Indonesia (dipimpin oleh Senduk), wakil pemuda Jong Ambon (J. Leimena), Pemuda Kaum Betawi (dipimpin Rohyani), PNI Bandung (dipimpin oleh Sartono), Budi Utomo Cabang Jakarta (dipimpin oleh Abdurachman), Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (dipimpin oleh Sunario), Pengurus Besar Partai Sarikat Islam (dipimpin Kartosuwiryo), Indonesische Club (dipimpin Sigit), Pasundan (diwakili Muhidin), Persatuan Minahasa (diwakili oleh A. I. Z. Monohutu) (*Yayasan Gedung-gedung Bersedjarah, 45 tahun Sumpah Pemuda, Jakarta, 1974, 62-63*).

Selain organisasi pemuda, peserta kongres juga datang secara pribadi dari tokoh-tokoh pergerakan saat itu, diantaranya: S.Mangunsarkoro, Purnomowulan, Mohammad Nazif, Siti Sundari, E.Puradiredja, Kuntjoro Purbopranoto, Sukmono, Wongsonegoro, Muhammad rum, Dien Patouw, Suwirjo, Sumanang, Masdani,

Anwari, Nona Tumbel, Tamzil, A.K.Gani, Jo tumbuan, Pangemaan, Halim, Antarpermana, Suwarni serta Kasman Singomdimedjo.

Kongres Pemuda kedua ini, dihadiri juga oleh anggota Volksraad yang diwakili oleh Suryono dan Sukowati, serta wakil pemerintah Belanda yang diwakili oleh Dr. Pyper dan Van der Plas. Keberagaman dari anggota peserta kongres, lebih disemarakkan juga dengan hadirnya kalangan pers, diantaranya surat kabar Keng Po (diwakili Saerun dan W. R. Supratman), namun pers dari pemerintah Belanda tidak hadir, hanya saja keterlibatan polisi Belanda yang hadir dengan “senjata lengkap” sudah menunjukkan bagaimana penyelenggaraan Kongres Pemuda II ini mendapat perhatian sekaligus pengawasan dari pemerintah Belanda sebagai penguasa wilayah Hindia Belanda saat itu.

Kongres Pemuda II ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, dibawah pimpinan Sugondo Djojopuspito, dalam pengawasan polisi pemerintah Belanda. Agenda kegiatan utama dibagi menjadi 3 sesi, yaitu rapat terkait dengan pokok pembicaraan tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang diketengahkan oleh Muhammad Yamin, juga membicarakan hal-hal terkait dengan pendidikan, pergerakan pemuda dan kepanduan (*Iis Suryani, Skripsi: 46*).

Dalam realisasinya, penyelenggaraan rapat tidak berjalan sesuai dengan agenda kegiatan kongres, dikarenakan pengawasan yang “berlebihan” dari pemerintah Belanda, yang mengkhawatirkan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di pusat pemerintahan Belanda yang lebih meluas di Batavia.

Puncak pelarangan pemerintah Belanda terjadi terutama dikala agenda menginjak rapat ketiga yang mestinya diawali dulu dengan arak-arakan pandu namun tidak diberikan izin untuk melakukan arak-arakan anak-anak (para pandu) dari berbagai organisasi kepanduan yang ingin ikut menyemarakkan acara tersebut.

Topik pembicaraan rapat ketiga tentang kepanduan, yang secara berturut-turut menampilkan pembicara Ramelan (inti pembicaraan menekankan pada fedah kepanduan), Theo Pamengaman (menekankan organisasi kepanduan harus bersifat nasional bukan kederaahan) dan Sunario (menekankan pada pentingnya kepanduan untuk menanamkan upaya meninggikan derajat bangsa) (*Iis Suryani, Skripsi: 47*).

Selain itu dalam sesi ketiga ini, sempat diperdengarkan pula permainan musik tanpa syair oleh W. R. Supratman yang kemudian hari dikenal dengan lagu Indonesia Raya, karena dilarang dinyanyikan syairnya, menghindari terjadi bentrokan dengan polisi Belanda yang mengawasi jalannya kongres secara terus menerus, sementara suasana dari eksekusi pelarangan terhadap arak-arakan sudah membuat situasi kondisi dalam rapat ketiga kongres semakin memanas.

Kongres Pemuda kedua, diakhiri dengan pengambilan keputusan yang dikenal dengan Ikrar Pemuda (yang kemudian tahun 1930 atas inisiatif Sukarno dan Muhamad Yamin diganti dengan Sumpah Pemuda).

Ikrar Pemuda menjadi Sumpah Pemuda

Kongres Pemuda II tahun 1928 yang berakhir dengan pendeklarasian Ikrar Pemuda meruapkan salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia memasuki “gerbang persatuan menuju Indonesia merdeka”, lebih dikenal dengan sebutan “Penegas”.

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada ketua kongres Sugondo Djojopuspito tatkala Sunario sedang berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan Kepanduan), selanjutnya dibubuhi paraf dan disebarkan kepada peserta lainnya untuk memberikan masukan sekaligus diparaf sebagai tanda persetujuan.

Konsepsi Sumpah Pemuda tersebut kemudian dibacakan oleh Sugondo Djojopuspito sebagai ketua kongres pada akhir sesi, dan mendapat penjelasan secara lebih mendetail oleh Muhammad Yamin Sendiri sebagai inspirator konsepnya, yang intinya menyatakan bahwa sebagai kristalisasi semangat penegasa cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dirintis sejak tahun 1908 oleh organisasi waktu itu.

Isi Sumpah Pemuda itu sendiri tentunya berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini dalam buku-buku sumber sejarah yang sekunder apalagi tertier. Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang mengherankan dalam keilmuan sejarah, dimana mempelajari terkait dengan arsip kenegaraan pra-Indonesia merdeka, dikenal adanya sumber naskah asli, naskah otentik dan naskah yang dilembar negarakan.

Naskah asli dalam peristiwa Kongres Pemuda terhadap keputusan hasil kongres kedua ini, tentunya adalah naskah yang ditulis tangan oleh Muhammad Yamin dan kemudian mendapat paraf dari ketua sekaligus para peserta kongres. Sangat disayangkan peneliti mencari naskah tersebut di musium Sumpah Pemuda disaat penelitian, namun sumber yang kompeten hanya bisa memberikan jawaban, kemungkinan disimpan di Kantor Arsip Nasional (Arnas) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu naskah otentik, adalah naskah yang sudah seharusnya disimpan di kantor Arnas, yang sewaktu-waktu bisa dipajangkan apabila ada momen tertentu, namun tidak ada kesempatan untuk penulis (karena keterbatasan waktu) untuk mengecek lebih lanjut ke kantor Arnas di Ampera Raya (sekarang ini).

Sementara konsepsi Sumpah Pemuda yang dilembar negarakan juga sudah dapat dipastikan disimpan di kantor Arnas walaupun ada jeda waktu yang cukup panjang antara peristiwa itu berlangsung 1928 dengan pengakuan secara resmi kenegaraan untuk memperingati secara skala nasional tahun 1948 bukan sekedar peringatan terhadap pergerakan nasional sampai tahun 1947 pasca Indonesia merdeka 1945.

Ide seorang Ki Hajar Dewantara yang berkapasitas sebagai seorang menteri, disampaikan pada Sukarno gagasan untuk menjadikan setiap tanggal 28 Oktober

sebagai hari Sumpah Pemuda, berlangsung sampai saat ini tercatat ke-90 dikala diperingati secara nasional bulan Oktober 2018 tahun yang lalu.

Sejarah sebagai suatu ilmu, dalam kapasitas kenegaraan Indonesia sebagai suatu negara bangsa sejak 18 Agustus 1945, terkadang mempunyai kontroversi terhadap interpretasi suatu peristiwa berlangsung, entah karena faktor subyektifitas, faktor data dan fakta yang minim atau malah berlebihan, atau paling menonjol karena politisasi atau kepentingan rezim/era pemerintahan yang mempunyai kepentingan tertentu.

Seperti halnya seputar peristiwa Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, tidak terlepas dari kontroversi yang berkisar diantara sejarawan itu sendiri. Ramai menjadi perbincangan di kalangan sejarawan bahwa nama putusan pemuda kongres kedua ini, sebenarnya disebut sebagai "Ikrar Pemuda" bukan Sumpah Pemuda, namun penamaan tersebut diroboh oleh Muhammad Yamin setelah tahun 1930-an.

Pergantian istilah sebenarnya bagi peneliti bukanlah suatu hal yang mengherankan, mengingat seorang Muhammad Yamin (dalam kenegaraan Indonesia, tercatat sebagai seorang pemikir ahli filsafat, yang mempunyai orientasi dasar kenegaraan kebangsaan Indonesia sepanjang hidupnya). Hal tersebut hampir sama dengan pola pemikiran Sukarno, yang selalu menempatkan orientasi pemikiran persatuan kebangsaan dalam kiprahnya.

Pergantian istilah kata "ikrar menjadi sumpah", dari sudut kebahasaan memang mempunyai arti yang berbeda, dimana memang kata ikrar merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:369), berjanji dengan sungguh-sungguh. Sementara kata "sumpah" (1996:973) dimaksudkan adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, untuk menguatkan kebenarannya.

Kontroversi lainnya adalah seputar isi Sumpah Pemuda, antara yang terpampang sekarang yang dipublikasikan di Musium Sumpah Pemuda (seperti dalam lampiran) dengan yang beredar dari salah satu koran yang etnis Tionghoa, Sinpo. Bukan hal yang aneh dan mengherankan bagi peneliti mengapa koran Sinpo menyebarkan ikrar tersebut, mengingat tempat yang dijadikan sebagai Kongres Pemuda II (yang sekarang dikukuhkan sebagai Musium Sumpah Pemuda) adalah rumah milik seorang penganut Katolik saleh, yang mengontrakkan kamar rumahnya kepada para pemuda diantara peserta kongres.

Menurut sejarawan J. J. Rizal, isi teks pasca-1950 berbeda dengan aslinya. Berdasar surat kabar harian sinpo itu sendiri (sayang peneliti tidak bisa menyelusuri sumber kontroversi ini) perbedaan kata hanya dengan penegasa kata "satu" tumpah darah-bangsa dan bahasa.

Dari sudut pandang peneliti, sesuatu kontroversi demikian dimungkinkan berobah, karena memang konstelasi politik yang terus bergejolak pasca Kongres Pemuda II

ini, terbukti makin merujuk semua aspek kehidupan di kalangan organisasi saat itu, semakin jelas pada tujuan untuk memerdekakan Hindia Belanda dari cengkraman Belanda itu sendiri, yang notabene sebagai penjajah.

Telaah atas Gambar Secara Visual di Musium Sumpah Pemuda

Musium Sumpah Pemuda merupakan salah satu musium di NKRI, yang diresmikan berdasar salah satu momen tematis yang terjadi dalam kapasitas kenegaraan Indonesia, pra Indonesia merdeka 1945. Semisal eksistensinya Musium Bank Mandiri, Musium Bank Indonesia, Musium Asia Afrika, Musium Pendidikan Indonesia dan lainnya, sebagai padanan dari musium tematis ini.

Musium Sumpah Pemuda ini terletak sekarang di Jalan Kramat Raya nomor 106, Kwitang Jakarta Pusat, yang tidak jauh letaknya dari pusat emas segi tiga Senen. Jalan Kramat Raya itu sendiri merupakan lanjutan dari Salemba Raya yang berdiri dengan kokoh bekas Sekolah Kedokteran Stovia (sekarang gedung kedokteran Universitas Indonesia), yang dianalogikan dalam konteks sejarah Pergerakan Nasional, cikal bakal tempat tumbuhnya nasionalisme yang “menjalar” dan bertumbuh kembang melahirkan Indonesi merdeka 1945.

Pada saat berlangsungnya Kongres Pemuda kedua ini, tempat kongres dilansungkan di rumah kontrakan para pemuda tersebut diantaranya Sugondo Djojopusppito yang sekaligus diusung sebagai ketua kongres, yang memang sejak awal diberi kebebasan untuk berkumpul oleh pemiliknya. Rumah tersebut dikontrakan pada para mahasiswa yang notabene sebagai anggota berbagai organisasi perkumpulan yang tumbuh dan berkembang pra Kongres Pemuda kedua berlangsung.

Dikala beberapa kali peneliti melakukan telaahan atas eksistensi musium ini, suasana atas jiwa zaman (*zeitgeist*) dalam gedung sangat kental dengan nuansa persatuan, terlebih-lebih bila dilihat berbagai diorama yang memperagakan berbagai momet disaat berlangsungnya 2 hari kongres 27 dan 28 Oktober 1928 (bisa dilihat pada lampiran).

Selain itu, berbagai slogan-slogan yang tersebar waktu itu dari berbagai tulisan yang masih kental nuansa persatuan terpampang pada dinding-dinding seputar dalam musium (sama halnya seperti kebanyakan model dari musium tematis lainnya). Hanya ada satu yang “alam modern” ke-Indonesiaan sekarang terasa berbeda, dikala berada di ruang belakang, yang memang ruang terbuka untuk pengunjung beristirahat (solat dan istirahat).

Model bangunan musium ini, terlihat masih terawat bersih, sesuai dengan model-model rumah tahun 1920 di Indonesia pada umumnya, tidak ada indikator perubahan dari model bangunan, baik dari struktur rumah, yang cenderung banyak sekat dengan ruang yang terbuka lebar, sekaligus kramik yang nuansa klasik dengan dukungan model jendela dan pintu yang memang klasik sejaman.

Sumpah Pemuda dalam konteks Indonesia Sebagai Negara Bangsa

Momen Kongres Pemuda II 1928 yang berakhir dengan pendeklarasian Sumpah Pemuda, eksistensinya dalam ketatanegaraan Indonesia bisa dikatakan menempati posisi “kedua” setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Banyak peristiwa yang melatar belakangi proses terjadinya Indonesia merdeka, namun zaitgeist Sumpah Pemuda sampai sekarang tahun 2018 sangat kental dengan pelibatan berbagai elemen bangsa dan dampaknya, terutama kaum muda (baik intelektual maupun kalangan pemuda pada umumnya) dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia.

Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai faktor integratif ke-Indonesiaan walaupun terkadang sekarang menjadi ingatan memori kolektif kenegaraan. Sekaligus sebagai penegas dalam kesatuan gerak dan arah perjuangan berbagai organisasi pemuda saat itu. Stigmatisasi terhadap pendeklarasian Sumpah Pemuda, membawa pengaruh yang sangat luas bagi Indonesia selanjutnya pasca 1928 baik pra Indonesia merdeka maupun menyangkut nasionalisme pasca Indonesia proklamasi 1945.

Dampak langsung terhadap eksistensi organisasi kepemudaan yang menjadi peserta kongres kedua ini, sangat jelas kentara, disamping komunikasi semakin intens, juga peleburan ataupun fusi bagi organisasi kerap terjadi, bahkan kemudian tidak sedikit yang sengaja “melebur” diri demi untuk perjuangan yang lebih kuat. Indonesia Muda (IM) didirikan secara resmi 1 Januari 1931 sebagai leburan dari berbagai organisasi pemuda yang berkategori politik waktu itu. Sepak terjang IM ini juga semakin jelas dan nyata dalam berkiprahnya, seperti: semakin menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan pelajar secara horizontal, mendirikan pusat-pusat kursus khusus untuk bahasa persatuan guna menghindari kesalahan persepsi dari kemungkinan penggunaan bahasa, selain peningkatan aktifitas melewati kegiatan olah raga yang dapat meningkatkan secara tidak langsung rasa solidaritas tanpa harus banyak mendapat pengawasan dari pemerintah Belanda.

Sementara itu dibentuknya Kepandungan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan fusi dari berbagai organisasi kepanduan yang ada pra-kongres kedua menjadi bukti kongkrit dari dampaknya, berupa penyeragaman sal merah putih (duk, dalam bahasa kepramukaan saat ini di Indonesia) yang dililitkan pada leher. Dimana sebelum terbentuknya KBI belum ada penyeragaman warna, namun sangat tergantung pada simbol warna tiap organisasi kepanduan itu sendiri.

Realitas historis dari eksistensi “nafas” Sumpah Pemuda, terus mengalami perkembangan, baik secara horizontal maupun vertikal secara sosial kemasyarakatan. Terlebih-lebih setelah Indonesia menjadi suatu negara bangsa tahun 1945, momen Kongres Pemuda ke-2 yang mengikrarkan Sumpah Pemuda, menjadi salah satu peristiwa yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober, sampai tahun 2022 juga, seperti halnya hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi sebagai satu Tumpah darah Indonesia

Konsep Tumpah darah merujuk pada (KBBI, 1996:1081) adalah “tanah (daerah) kelahiran. Istilah tumpah darah ini didengungkan oleh Sunario untuk mengingatkan betapa pentingnya dipersatukan oleh satu persamaan sejarah karena tanah kelahiran dari para peserta Kongres Pemuda II yang berada di bawah “kendali” negara Belanda.

Sunario (lebih tepatnya yang kemudian dikenal dalam sejarah sebutan Mr. Sunario) adalah seorang pandu “produk” Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) tahun 1931 yang merupakan organisasi baru kepanduan pasca Kongres Pemuda II tempat meleburkan diri semua organisasi kepanduan sebelum kongres.

Sementara konsep tumpah darah secara politik menurut Sukarno dapat disamakan dengan konsep berbangsa dan bernegara bekas wilayah jajahan Belanda, yang lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (versi Belanda) atau Nusantara (versi orang-orang Indonesia pra-kemerdekaan 1945)

Dilihat dari konsep kewilayahan yang identik dengan tumpah darah konsep awal dari sumpah pemuda yaitu wilayah yang identik/sama/kongruen/sebangun dengan Hindia Belanda bekas jajahan Belanda yaitu hanya masa 1967-1976 disambung tahun 1999-2001, karena setelah tahun 2002 sampai sekarang tahun 2019, realistiknya berkurang dengan wilayah Kepulauan Sipadan dan Ligitan.

Diakui ataupun tidaknya secara perorangan ataupun lembaga, konsepsi Tanah Air Indonesia sebagai satu Wilayah, merupakan hal yang paling sukar mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Karena hal ini terkait dengan aspek kedaulatan (kekuasaan tertinggi atas pemerintahan/daerah).

Dampak Sumpah Pemuda pada eksistensi Belanda sebagai penguasa Indonesia saat itu cukup membawa kekhawatiran tersendiri, karena rasa kebangsaan yang bisa merembet pada penuntutan untuk hegemoni kekuasaan wilayah yang jelas dan nyata bukan hanya imajiner. Gerak tindak lanjut kekhawatiran Pemerintah Belanda, kemudian ditindak lanjuti dengan diberlakukannya *Territoriale Ze end Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 nomor 442 (selanjutnya disingkat TZMKO), dimana dalam Pasal 1 ayat 1 Ordonansi ini ditentukan bahwa “lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut diukur dari garis air terendah dari pulau-pulau Indonesia”.

Berlakunya ordonansi dari TZMKO ini sudah bisa ditebak pemikiran kekhawatiran persatuan kebangsaan yang “menjalar” ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa terutama, pengaruh dari Kongres Pemuda II di Jakarta. Secara tidak langsung, pemerintah Belanda berusaha mengurangi pengaruh sekaligus komunikasi lebih intens antara satu daerah dengan daerah lain yang merupakan wilayah Hindia Belanda (yang pada kenyataannya selanjutnya tidak bisa dihindarkan menjadi suatu negara bangsa sejak 18 Agustus 1945 dengan mengusung konsep kewilayahan Hindia Belanda sebagai konsep kenegaraan Indonesia).

Sampai dengan tahun 1944 tidak ada perkembangan yang berarti dari pengaruh Ordonansi ini, apalagi dalam realitasnya Belanda harus “hengkang” dari Hindia Belanda, karena kalah oleh Jepang dalam perang Pasifik. Baru disaat Belanda yang diboncengi tentara Inggris datang kembali masuk di Indonesia yang sudah posisi menjadi negara merdeka, bermaksud mengambil alih kembali wilayah bekas jajahannya sebagai konsekuensi dari Persetujuan Postdam di Jerman bagi negara-negara yang menang perang yang berada di bawah kekuasaan Inggris (Sekutu).

Konflik berkelanjutan antara pemerintah Belanda yang merasa memiliki wilayah Hindia Belanda dengan pemerintah NKRI yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan sudah menjadi suatu negara bangsa tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan juga wilayah Hindia Belanda identik/kongruen/sebangun dengan wilayah Indonesia.

Perang tidak terhindarkan, sehingga dikenal dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II (versi sejarawan Indonesia) atau Aksi Polisional I dan II (versi pemerintah Belanda), padahal posisi pemerintahan NKRI sudah berpindah ke Jogjakarta untuk penyelamatan sekaligus perpindahan pemimpin eksekutifnya, yaitu Presiden Sukarno bersama wakilnya Muhammad Hatta.

Diselingi diantara konflik kekerasan bersenjata berupa peperangan antara kedua belah pihak, juga ada perjuangan diplomasi (Linggajati, Renville, Roem Vn Royen, Antar Indoensia, Malino dan terakhir Konferensi Meja Bundar/KMB). Namun dalam konsep kewilayahan NKRI sebagai negara bangsa belum berhasil merobah Ordonansi TZMKO, karena situasi kondisi negara dalam Perang Kemerdekaan.

Sebagai konsekuensi, walaupun telah menjadi suatu negara bangsa, NKRI sampai dengan tahun 1956 masih tetap tercatat menggunakan konsep kewilayahan TZMKO versi Belanda, dimana konsekuensi yang sangat merugikan adalah lautan diantara pulau-pulau Indonesia tidak merupakan satu wilayah Indonesia, namun merupakan laut bebas. Hal ini akan mengancam kedaulatan sebagai negara bangsa. Dengan kata lain memecah belah keutuhan wilayah, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri.

Pakta adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda 27 Desember 1949 setelah dilakukan perundingan KMB, atas kemerdekaan NKRI, tidak serta merta menjadikan Indonesia “utuh menyeluruh” sebagai suatu negara bangsa dari sudut pandang konsep kewilayahan Hindia Belanda, karena dengan “skenarionya” Belanda menahan Irian Barat sebagai salah satu isi perjanjian KMB dengan asumsi akan dikembalikan 1 tahun kemudian. Namun dalam realitasnya, Irian Barat baru dikembalikan 1 Mei 1963 (itu pun atas tekanan dari Amerika Serikat).

Dalam konsep kewilayah sebagai tumpah darah NKRI baru mendapat kepastian hukum atas seluruh wilayah kedaulatan yang diperjuangkan dikala dideklarasikannya konsep kedaulatan negara Indonesia oleh Perdana Menteri Djuanda 13 Desember 1957. Diperjuangkan konsepsi ini sebagai “negara kepulauan”

(*Archipelagic State Concept*) yang kemudian dideklarasikan tanggal 13 Desember 1957, yang lebih dikenal dengan istilah “Dekrasai Djuanda” karena Djuanda sebagai Perdana Menteri yang menandatangani sekaligus mengumumkannya pada saat itu). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan “lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Teori ini dikenal dengan “*Point to Point Theory*”.

Konsekuensi dari pemberlakuan Deklarasi Djuanda ini membawa perubahan yang sangat signifikan pada konsepsi kewilayahan NKRI, yang menjadikan laut diantara pulau-pulau itu bukan lagi sebagai pemisah, namun justru sebagai pemersatu Indonesia. Sangat disayangkan kedaulatan yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri Djuanda ini, tercoreng dengan proses penganeksasian wilayah bekas jajahan Portugis yaitu Timor Timur yang dimasukkan menjadi bagian terintegrasi dari wilayah Indonesia sampai tahun 1999 dikala wilayah tersebut “dilepas” menjadi negara tersendiri atas bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Belum lama NKRI menjadi suatu negara bangsa dengan wilayah identik bekas jajahan Hindia Belanda, ujian percobaan pada wilayah tumpah darah ini mendapat “tamparan yang sangat besar” sekaligus menunjukkan kekalahan diplomasi Indonesia pada tataran internasional, dengan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Ligitan yang jelas-jelas merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda. Namun karena “terabaikan” pengurusannya sejak pembentukan peta konsep kewilayahan tahun 1969 masa Suharto sebagai presiden, maka kedua kawasan tersebut didanai oleh Inggris dengan menjadikan sebagai resort-resort yang dikelola oleh Negara Malaysia, sehingga pengklaiman kedua kawasan yang sudah beralih fungsi dengan serta merta ujungnya menjadi beralih kepemilikan, setelah Indonesia kalah melawan 16 suara di Mahkamah tahun 2002.

Sejak tahun 2002 itulah, pengklaiman tanah tumpah darah Indonesia, menjadi tidak identik lagi dengan wilayah bekas jajahan Belanda sampai sekarang ini. Pada akhirnya dari implementasi konsepsi ini, konsep satu bangsa dan satu bahasa dapat dianggap terimplementasikan secara final dalam kemasyarakatan, namun untuk konsep satu tanah air, masih terus menyisakan permasalahan yang belum tertuntaskan sampai saat ini, terutama menyangkut batas wilayah dengan 1 negara yaitu Singapura. Sedangkan untuk perbatasan dengan 9 negara lainnya baik di wilayah daratan maupun perbatasan lautan sudah dicapai kesepakatan yang nyata.

Implementasi sebagai Berbangsa yang satu

Implementasi sebagai suatu negara bangsa final dan berakhir pada saat diproklamasikannya Indonesia sebagai suatu negara tanggal 17 Agustus 1945, terlepas dari sudah adanya pengakuan dari dunia internasional pada hari tersebut (yang realitanya, pengakuan secara penuh dari negara-negara di dunia, diperoleh setelah adanya pengakuan keadualatan dari Belanda bulan Desember tahun 1949).

Langsung maupun tidak langsung pengakuan yang sangat nyata dapat dilihat dari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang pesertanya dikirim berasal dari negara di benua Asia dan Afrika sebanyak 29 negara tercatat mengirimkan utusannya. Dalam proses perjalanan setelah terbentuk menjadi suatu bangsa sampai sekarang, instabilitas politik baik berskala nasional maupun internasional kerap terjadi dalam catatan sejarah Indonesia, namun legal-formal konstitusionalnya NKRI tetap berdiri sebagai satu bangsa, kecuali ada pergantian Ideologi negara Pancasila yang notabene terdapat dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945, bagian pembukaan.

Sehari setelah diproklamasikan NKRI 17 Agustus 1945, terbentuklah secara legal formalnya negara, dengan dipenuhinya 3 syarat syahnya suatu negara, yaitu: wilayah, rakyat dan pemerintahan. Sementara syarat ke-4 berupa pengakuan hubungan internasional, eksistensi NKRI sebelum adanya pengakuan dari Belanda 27 Des 1949 hanya sebatas "isapan jempol" semata, krn asumsi dasarnya Belanda tidak pernah mengkauui, shg sampai akhir 1949 Belanda dg serta merta terus-terutsan mengganggu ketertiban kenegaraan Indonesia.

Bukti kongkrit pindahnya Ibu kota NKRI ke Jogjakarta beserta dengan pemerintahan eksekutifnya (RI-1 dan RI-2) nya. Bukti lainnya dikala Sukarno dan Hatta ditangkap Belanda untuk kemudian dibuang ke Bengkulu oleh Belanda, sbg realitas bahwa Belanda seolah2 mengambil hak untuk mengamankan wilayahnya kembali.

Implementasi hasil Kongres Pemuda II, terjadi dan final tanggal 17 Agustus 1945, yang sampai kapanpun tanggal tersebut tidak dapat "ditawar" lagi, kecuali Indonesia sebagai negara bangsa bubar atau dibubarkan. Artinya sebagai negara bangsa, Indonesia sejak tanggal tersebut telah berdiri sebagai suatu negara bangsa, yang didasarkan pada eksistensi wilayah, penduduk dan pemerintahan, walaupun pengakuan dari dunia internasional tidak serta merta didapat (dalam arti untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional secara organisasi resmi PBB baru pada pertengahan tahun 1950, sedangkan dari negara- negara lain secara pernegara, yang realisasinya pada waktu diselenggarakannya Konfrensi Asia Afrika tahun 1955, hampir $\frac{3}{4}$ negara-negara di benua Asia Afrika mengikuti, yang artinya langsung maupun tidak langsung kehadirannya menunjukkan mengakui Indonesia sebagai suatu negara bangsa).

Implementasi konsepsi menjunjung Bahasa persatuan

Mengupas eksistensi bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah sama prosesnya dengan mengkaji proses tumpah darah dan bangsa. Bahasa itu merupakan alat komunikasi antara manusia (bahasa lisan-tulisan maupun sekalipun bhs isyarat) yang pleksibel dan dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan tren dengan mudah sesuai dengan zeitgeistnya negara.

Dari ketiga konsepsi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928 yang tertentu saja merupakan satu-satunya dari 3 esensi konsepsi Sumpah Pemuda yang paling mudah dipraktikkan, tanpa harus melalui aturan legal-formal konstitusional (sekalipun). Namun tertentu saja dalam proses setelah menjadi suatu negara bangsa, aturan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, langsung dirumuskan legal formalnya dalam UUD 1945

Proses lahirnya “Bahasa Indonesia” tentu mempunyai “alur cerita” tersendiri, dimana konsep nama Indonesia itu merujuk pada konsep kewilayahan Hindia Belanda, dan kata Indonesia itu sebagai kata yang “muncul” secara lebih populer sebagai padanan kata nusantara dari sudut pandang orang Indonesia yang menempatkan Belanda sebagai penjajah.

Jatuhnya pilihan bahasa (daerah) Melayu dibanding dengan bahasa Jawa, dengan pertimbangan struktur bahasanya yang lebih simple dan sederhana serta tidak mengenal tingkatan bahasa halus-sedang dan kasar, membuat bahasa Melayu menjadi dikenal lebih luas dan memasyarakat sesudah pengikraran Sumpah Pemuda tersebut.

Perkembangan bahasa Melayu setelah Kongres Pemuda ke-2, yang digunakan sebagai (dasar) bahasa pengantar komunikasi dalam sesama “intra dan inter” organisasi-organisasi yang telah ada dan terbentuk baru (fusi sekalipun) yang berasal dari berbagai daerah, mempunyai dialek tersendiri. Tentu saja bahasa melayu yang digunakan orang-orang organisasi Pasundan dipengaruhi secara tidak langsung oleh anasir bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dari asal organisasi

Demikian juga bahasa melayu yang digunakan oleh Jong Sumatranen Bond, Jong Batak yang dipergunakan sebagai alat komunikasi menjadi bertambah kaya dengan dialek dan pembendaharaan bahasa ibu kedua organisasi tersebut. Demikian juga berlaku untuk seluruh organisasi. Lambat laun, Bahasa Melayu (asli) yang diangkat menjadi bahasa persatuan, menjadi suatu “identitas tersendiri” bahasa yang diperkaya oleh pemberdaharaan bahasa daerah dari seluruh wilayahan Indonesia. Terciptahan secara tidak langsung, bahasa Indonesia yang sudah tidak “mengakar kuat” lagi pada bahasa Melayu (sebenarnya). Inilah yang berkembang menjadi bahasa Indonesia selanjutnya.

Dalam kapasitas kenegaraan Indonesia, tentu saja Bahasa Indonesia ini mengalami berbagai pengaturan untuk ketertiban dalam proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dunia akademik. Namun hal tersebut perlu kajian lebih lanjut untuk diteliti sebagai sebuah karya ilmiah tersendiri, khususnya untuk menelaah kontribusi bahasa Melayu dalam perkembangannya menjadi bahasa Indonesia secara legal-formal dan konstitusionalnya, termasuk pembabakannya sampai eksistensinya abad revolusi industri 4.0 ini.

Implementasi dari Sumpah Pemuda dalam aspek Bahasa Indonesia, sebenarnya merupakan hal yang paling awal dibanding dengan dua aspek lainnya (tanah air maupun bangsa) di samping hal yang paling mudah diimplementasikan dalam tata

kehidupan secara perorangan orang Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung (rakyat Indonesia waktu itu) maupun oleh organisasi-organisasi yang ada masa Pergerakan Nasional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data dan fakta:

1. Dipakainya bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan dan bahasa komunikasi antara orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai jenis organisasi yang ada waktu itu.
2. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam surat kabar yang terbit setelah peristiwa Kongres Pemuda II tahun 1928, walaupun masih “dicampur aduk” dengan bahasa asal dari surat kabar. Sebagai bukti fisik, di Arsip Nasional maupun Perpustakaan Nasional dapat dilihat pesatnya perkembangan penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh para penulis (baik dari kalangan pelajar, pelajar pejuang, wartawan dan sebagainya).
3. Sementara pada zaman pendudukan Jepang, kedudukan bahasa Indonesia mendapat kemajuan sangat lebih pesat, sejalan dengan pelarangan Jepang sebagai penjajah untuk menggunakan bahasa Belanda dan menggantikannya secara resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi “kenegaraan”, termasuk dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan teks bahasa tertulis.

Dalam panggung sejarah kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, Eksistensi Bahasa Indonesia, sejak Kongres Sumpah ke-2 Indonesia terus mengalami perkembangan, apalagi setelah diproklamasikan 17 Agustus 1945, terus berkembang dan dikukuhkan secara legal formal konstusional dalam Konstitusi Dasar Negara Tertulis Tertinggi, yaitu UUD 1945.

SIMPULAN

Peringatan Sumpah Pemuda dalam panggung sejarah NKRI sampai tahun 2022, setiap tanggal 28 Oktober merupakan salah satu bukti dari makna pentingnya arti berbangsa, bertanah air dan berbahasa nasional yang bisa merupakan faktor integrative dan kelanggengan Indonesia sebagai negara bangsa.

Namun bukan berarti NKRI akan selalu mempunyai tingkat Ketahanan Nasional yang stabil hanya dengan selalu memperingati setiap tahunnya, perlu adanya kebijakan dari pemerintah diperkuat melalui legislasi kewilayahan/tanah air, penguatan nilai-nilai berbangsa dan bernegara serta pembinaan Bahasa Indonesia yang terus menerus (baik dalam aspek formal maupun aspek non formal di masyarakat).

Perlu penegasan Era globalisasi yang kecenderungan “negara tanpa batas” hanya berlaku selain untuk batas negara, karena realitanya wilayah suatu negara merupakan suatu “keharusan” yang tidak dapat ditawar-tawar kembali. Sementara dalam penggunaan Bahasa Indonesia, hal terberat masa sekarang adalah semakin meluasnya

penggunaan bahasa “alay” dari generasi muda dan semakin naik “prestise” bahasa Inggris serta bahasa PBB lainnya, terutama Bahasa Cina.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (1997). *Singa dan Banteng*. Jakarta: UI-Press.
- Basri, Y. (1975). *SNI V, Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*. Jakarta: Depdikbud.
- Bijkerk, J. C. (1988). *Selamat Berpisah, sampai berjuma di saat yang lebih baik, documenter runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Djambatan.
- Hering, B. (2003). *Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka, sebuah Biografi 1901-1945*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Kahin, A. R., & Kahin, G. M. T. (1997). *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Meningskap keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Kahin, G. M. T. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. UNS Press.
- Kartodirdjo, S. (1967). *Lembaran Sejarah, Kolonialesme dan Nasionalisme di Indonesia, abad XIX –XX*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM.
- Kartohadikusumo, S. (1990). *Soetardjo, Petisi Soetardjo dan Perjuangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koch, D. M. G. (1951). *Menuju Kemerdekaan, Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*. Bandung: Vorkink.
- Leirissa, R. Z. (1985). *Terwujudnya Suatu Gagasan, Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Moedjanto, G. (1991). *Indonesia Abad ke-20, dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyana, S. (1969). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Notosusanto, N. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*. Depdikbud: Jakarta.
- Panitia Konferensi Internasional Revolusi Nasional: Kajian, Kenangan dan Renungan. (1997). *“Denyut Nadi Revolusi Indonesia”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poeze, H. A. (1999). *Pergulatan Menuju Republik, Tan Malaka 1925-1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Pranoto, S. W. (2000). *Revolusi Agustus, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Laper.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi: Jakarta.
- Said, S. (1993). *Genesis Of Power, General Sudirman And The Indonesian Military in Politics 1945-1949*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Sastrosatomo, S. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soeharto, P., & Ihsan, A. Z. (1981). *Permata Terbenam,, kumpulan tulisan asli dan pidato tokoh-tokoh perintis pergerakan kebangsaan dalam menelusuri berkembangnya nasionalisme*. Jakarta: Aksara Jayasakti.
- Soeharto. (2002). *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942, Profil Pergerakan Etno-Nasionalis*. Bandung: Satya Historika.
- Tirtoprodjo, S. (1965). *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Djakarta: Pembangunan Djakarta.
- Tirtoprodjo, S. (1966). *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950*. Djakarta: Pembangunan.
- Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. (1986). *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. (1962). *Peranan Pemuda Muhammad Yamin Sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*. Djakarta: Departemen Penerangan RI.